

Volume 2 Nomor 2 November 2017

e-ISSN 2541-0938

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME
2

NOMOR
2

SINTANG
NOVEMBER
2017

e-ISSN
2541-0938

JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi
VOLUME 2, NO 2, 2017

DAFTAR ISI

Kapital Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Terpencil Helena Anggraeni, Tjondro Sugianto STIM Shanti Bhuana Bengakayang, Indonesia	61-68
Penerapan Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pokok Bahasan Permintaan dan Penawaran di Sekolah Menengah Atas Rudi Hartono, Avelius Domingus Sore STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	69-82
Pengaruh Infromasi Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Yunita astikawati, Emilia Dewiwati Pelipa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	83-91
Pengaruh Transaksi Investor Asing Terhadap Transaksi Investor Domestik Di Pasar Modal Indonesia Yunita Astikawati, Dessy Triana Relita STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	92-102
Peran Credit Union Dalam Bidang Agribisnis Untuk Pembangunan Pertanian Dan Ekonomi Sabinus Beni, Blasius Manggu STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia	103-111
Upaya Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa dengan Metode Pembelajaran <i>Role Playing</i> Materi Pasar di Kelas VIII Sarce Yuliana Tamelan, Yulia Suriyanti, Valentinus Ola Beding STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	112-117

**KAPITAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DI KAWASAN TERPENCIL**

Helena Anggraeni¹, Tjondro Sugianto²

STIM Shanti Bhuana Bengakayang, Indonesia

Email: helena@shantibhuana.ac.id

Diterima: 15 Oktober 2017; Disetujui: 25 Oktober 2017; Diterbitkan: 1 November 2017

Abstract: *The geographic position of an area should not be a determinant of the economic development in a region. When a region has a low level orbitation to the central government, it is necessary to find alternative capital that is actually embedded in the community and potential to be developed. Rather, the pattern of central development that be applied in a remote area without regard to local condition will only lead to failure. In this case, social capital that can roll out community based development can be a solution especially for people who living in remote area.*

Keywords: *social capital, development community*

Abstrak: Posisi geografis dari sebuah kawasan seharusnya bukan merupakan faktor penentu berkembang atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Ketika sebuah kawasan memiliki orbit yang rendah terhadap pemerintahan pusat, justru perlu dicari kapital alternatif yang sesungguhnya sudah tertanam di kalangan masyarakat dan potensial dikembangkan. Justru, pola pembangunan dari pusat yang dipaksakan di sebuah daerah tanpa memerhatikan kondisi setempat hanyalah akan membuahkan kegagalan. Dalam hal ini, kapital sosial yang dapat menggulirkan pembangunan berbasis komunitas dapat menjadi solusi khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Kata Kunci: *Kapital Sosial, Komunitas Pembangun*

PENDAHULUAN

Kontinuitas pola pemerintahan kolonial hingga zaman Orde Baru telah menjadi perhatian Hans Antlöv (2001) lewat penelitiannya di Majalaya, Jawa Barat. Agaknya, kontinuitas tersebut masih aktual pada masa kini dalam bentuknya yang berbeda. Dalam era globalisasi ini, kebijakan kapitalisme dan pasar bebas di negara-negara industri maju dipenetrasikan ke negara-negara yang dikategorikan oleh mereka sebagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemudian, setelah segala kebijakan itu diadopsi oleh pemerintah pusat Indonesia, diteruskan lagi ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, terjadilah kontinuitas pola pemerintahan dari negara industri maju ke pemerintahan pusat negara berkembang sampai ke pemerintah daerah. Hal ini serupa dengan yang digambarkan oleh Antlöv mengenai kehadiran pemerintahan pusat di daerah dalam tulisannya, *Exemplary centre administrative periphery*. Apabila kebijakan yang dipaksakan itu ternyata tidak cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah, maka pola pemerintahan tersebut tiada ubahnya dengan pemerintahan kolonial. Dengan demikian, ada dua macam kontinuitas dalam hal ini, yaitu kontinuitas dalam waktu mulai masa kolonial hingga pasca reformasi, dan kontinuitas dalam geografis mulai dari ne-

gara industri maju sampai pemerintahan daerah di negara berkembang.

Sebagaimana yang diungkapkan di atas, permasalahan timbul apabila kebijakan yang berkontinu itu tidak sesuai dengan masyarakat setempat. Masyarakat Manggarai Timur merupakan masyarakat yang komunal, agraris, dan hidup dalam kelembagaan yang khas. Data BPS menunjukkan mayoritas masyarakat Manggarai Timur masuk dalam kategori miskin. BPS (2007) melaporkan bahwa jumlah keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin sebanyak 27.367 KK (54.61%), miskin sebanyak 13.790 KK (27.52%), sedang miskin sebanyak 8721 KK (17.40%) dan kaya sebanyak 1601 KK (3.19%). Jadi, berdasarkan kriteria BPS, sebagian besar masyarakat Manggarai Timur hidup dalam kemiskinan. Jika dilihat secara fisik, rumah-rumah mereka yang tinggal di pedesaan kebanyakan berindingkan papan atau bilik bambu dengan lantai tanah atau papan tanpa keramik. Atap rumah mereka sebagian besar terbuat dari alang-alang kering atau seng.

Di lain pihak, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai rencana untuk membangun daerahnya. Namun, tentu saja untuk itu pemerintah daerah perlu menerima uluran bantuan dari pemerintahan pusat. Sadar ataupun tak sadar, uluran bantuan pembangunan itu tak lain berarti

modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dua hal inilah yang menjadi orientasi pemerintah daerah untuk membangun kabupatennya. Padahal, modernisasi hanyalah sebuah kata indah yang membalut proses diferensiasi karya dan spesialisasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengandung kapitalisme di dalamnya. Semangat kapitalisme dan individualisme sangat dibutuhkan untuk menyuburkan industrialisasi dan melancarkan mekanisme pasar bebas. Di sinilah muncul masalah karena masyarakat Manggarai Timur sangat komunal, jauh dari semangat individual yang menjiwai kapitalisme. Hidup kekerabatan, ikatan adat istiadat, dan keseharian yang komunal menyulitkan terjadinya diferensiasi karya dan spesialisasi. Hampir segala hal mereka lakukan bersama-sama sehingga kesenjangan besar baik dalam bidang ekonomi maupun keahlian di antara mereka nyaris

tidak ada. Dengan perkataan lain, masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara pola pembangunan dengan kondisi masyarakat.

Selain itu, jika dilihat masyarakat yang miskin padahal memiliki tanah yang subur dan luas, timbullah dugaan bahwa selama ini Negara nyaris absen dalam pembangunan di Manggarai Timur. Hal ini terutama dikarenakan Manggarai memiliki orbitasi yang rendah secara geografis maupun akses terhadap pemerintahan pusat. Kesuburan tanah Manggarai Timur dapat dilihat dari berkembangnya berbagai tanaman komoditi di sana, seperti kopi, cengkeh, coklat, vanili, jambu mente, dan sebagainya. Secara umum Kabupaten Manggarai Timur mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jumlah curah hujan rata-rata 2440.9 mm setiap tahun.

Tabel. 1 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Tahun 2003

No	Kecamatan	Luas	Perkampungan	Sawah		Tegalan/ Ladang	Perkebunan
				2X	1X		
1	Borong	49.026	169	198	508	4993	33
2	Kota Komba	49.194	72	-	2754	3847	1178
3	Elar	56.759	218	260	117	2628	9
4	Sambi Rampas	40.009	107	72	482	5144	55
5	Lamba Leda	36.043	161	-	292	3255	-
6	Poco Ranaka	20.924	92	356	1389	1943	451

Sumber: BPS Manggarai.

KAJIAN TEORI

Tujuan ideal dari sebuah pembangunan tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan menjadi sebuah proses yang

bergulir terus menerus membawa masyarakat menuju kebebasan sejatinya (Sen, 2000). Akan tetapi, ketika terjadi distorsi dalam pembangunan, maka pembangunan pun tidak dapat mencapai

sasarannya. Dalam era globalisasi saat ini, distorsi tersebut rupanya turut mengglobal pula sehingga dapat dijumpai sampai di daerah-daerah.

Ketika distorsi pembangunan terus menerus terjadi, atau dengan perkataan lain, saat kesejahteraan masyarakat tak mengalami kemajuan yang signifikan, Negara seolah sudah tiada di daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari kurang mampunya masyarakat mengenyam pendidikan dengan baik, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, infrastruktur yang minim, tidak adanya jaminan ketransparanan pemerintah, dan sebagainya. Peran Negara dirasakan sangat kurang dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam situasi demikian, dibutuhkan suatu jaringan masyarakat yang dapat menjadi kapital sosial dan membuahakan pembangunan ekonomi di daerahnya.

Istilah Modal Sosial ini pertama kali ditenarkan oleh James S. Coleman. Coleman (1988) mengatakan ada tiga unsur penting dalam modal sosial, yaitu kewajiban dan harapan, aliran informasi, serta norma dan sanksi. Kewajiban yang dijalankan dengan baik akan melahirkan *trust* sehingga terbentuklah jaringan. Berbeda dengan Coleman (1988) yang memandang jaringan terjadi karena adanya *trust*, Fukuyama (2000) melihat jaringan terjadi

justru karena adanya norma-norma informal yang menghasilkan kerja sama antara dua atau lebih individu. Dengan perkataan lain, ada kumpulan norma informal yang membentuk sebuah jaringan antara dua orang atau lebih sehingga menghasilkan modal sosial. Ciri khas yang diberikan oleh Fukuyama mengenai jaringan ini adalah bahwa jaringan tersebut ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai bersama mereka. Norma-norma yang mendasarinya merupakan norma-norma informal dan bukan sebuah hubungan otoritas formal. Di dalam jaringan tersebutlah para anggotanya saling berinteraksi dalam hukum resiprositas. Putnam (1995) setuju jaringan masyarakat semacam ini disebut sebagai modal sosial. Secara ringkas, ia menggambarkan modal sosial sebagai kelompok sosial yang memiliki unsur jaringan, norma, dan *trust* yang memampukan para anggotanya berpartisipasi untuk mengambil tindakan yang efektif mengejar tujuan bersama.

Unsur pertama dalam perspektif Coleman mencerminkan kondisi resiprokal dari kewajiban dan tanggung jawab, yang diperlancar oleh *trust* sosial, sehingga terbangunlah struktur jaringan publik yang terjalin antar individu. Unsur kedua, yaitu aliran informasi, mencerminkan pengetahuan dan pengertian yang mengalir di sepanjang jalur-jalur koneksi antar

pribadi yang dibangun oleh masyarakat. Sedangkan unsur ketiga, yaitu norma dan sanksi, mencerminkan sistem konvensi normatif yang berlaku dalam masyarakat dan sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran. Hal ini sangat membantu dalam meregulasikan hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, jelas bagi Coleman bahwa modal sosial bukan sekedar perekat tetapi juga pelumas yang mengikat antar individu sekaligus memfasilitasi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi, sesungguhnya kewajiban yang ada dalam unsur pertama sebetulnya sudah terakomodir dalam unsur yang ketiga, yaitu norma dan sanksi. Dengan demikian, *trust* lahir bukan semata karena kesetiaan penunaian kewajiban melainkan karena adanya nilai-nilai dalam norma yang dihayati bersama. Itulah sebabnya Fukuyama memandang jaringan terjadi karena adanya penghayatan nilai-nilai bersama, yang berupa norma-norma informal. Pemilihan Fukuyama atas norma-norma informal dan bukannya formal ini bisa dimengerti karena modal sosial seringkali dikaitkan dengan penghematan biaya transaksi. Norma-norma informal tentunya akan memotong hirarki dan birokrasi yang acapkali membengkakkan biaya transaksi, setidaknya itulah yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang. Dalam norma-

norma informal, interaksi terjadi dalam toleransi. Toleransi di sini dapat dimengerti sebagai tidak adanya benturan kepentingan antar anggota. Dengan demikian, terjadilah peneguhan pernyataan Putnam mengenai modal sosial yang memungkinkan anggotanya mengambil tindakan efektif untuk mengejar tujuan bersama. Tujuan sekelompok manusia tidak akan sama jika tidak terjadi penyesuaian atau toleransi. Dapat dilihat toleransi ini bermain di tingkat norma atau nilai-nilai yang dianut bersama. Toleransi inilah yang menentukan kapan dua buah komunitas menjadi satu *bonding* dan kapan menjadi *bridging*.

Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan modal sosial merupakan sebuah potensi dalam komunitas masyarakat yang berbentuk jaringan sosial. Jaringan ini terjadi karena adanya norma-norma yang dihayati bersama sehingga melahirkan *trust* satu sama lain. *Trust* muncul karena norma-norma yang ada mengatur relasi sosial yang terjadi bersifat resiprokal. Adapun jaringan sosial yang terjadi memiliki sifat toleransi yang mengurangi norma-norma formal dan menciptakan tujuan bersama. Dengan perkataan lain, sebuah jaringan sosial yang tidak memberikan dampak positif kepada anggotanya tidak dapat dikatakan sebagai modal sosial

METODOLOGI PENELITIAN

Adanya ketidaksesuaian antara pola pembangunan dengan kondisi masyarakat menjadi masalah yang melatarbelakangi penelitian ini. Dugaan kesenjangan ini muncul karena alam Manggarai Timur yang cukup subur dan indah tidak memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Dalam suasana senjang ini sebetulnya dibutuhkan kelahiran sebuah kapital sosial yang tanggap. Seperti apakah kapital sosial yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat Manggarai Timur?

Seting penelitian berada di Kampung Mondo, sebuah kampung yang berada di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan melihat bagaimana masyarakat yang agraris, komunal, dan tradisional bertemu dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada kapitalisme dan modernisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapitalisme dan globalisasi yang merebak di dunia Barat hingga ke Indonesia, tidak sesuai dengan pandangan masyarakat tradisional mengenai dunia. Jiwa kompetitif yang kuat mewarnai perekonomian kapitalis tak dimiliki oleh masyarakat komunal yang umumnya memiliki kepemilikan kolektif. Oleh karena itu, tak mengherankan jika mereka

dilibatkan dalam pasar bebas, mereka hanya akan menjadi korban sebagai buruh yang dibayar murah namun mendatangkan keuntungan besar bagi pengusahanya.

Teori-teori pembangunan yang berpihak kepada masyarakat tradisional adalah teori-teori yang sesuai dengan dunia menurut pandangan mereka. Dengan demikian, teori tersebut perlu bersifat bottom-up, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di akar rumput. Masyarakat tradisional dan agraris, akan memandang dunia mereka tak dapat dipisahkan dari kebunnya. Kebun bagi mereka bukan sekedar sumber yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani namun juga kebutuhan spiritual mereka. Kebun bukan sekedar aset yang menghasilkan komoditas namun warisan leluhur yang perlu dipelihara sesuai dengan cara leluhur pula sebagai manifestasi penghayatan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, mengubah masyarakat agraris yang tradisional dan spiritualistis ini menjadi masyarakat industri menjadi opsi yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan dunia mereka. Manusia agraris tersebut akan kalah bersaing dalam dunia industri sehingga statusnya hanyalah menjadi buruh yang memperkaya manusia industri. Maka, kesenjangan ekonomi antara mereka yang kaya dan miskin pun akan semakin jauh. Komunitas tradisional dan komunal yang agraris itu pun

perlahan-lahan akan mati di dunia yang tidak dikenalnya lagi. Kapitalisme melepaskan semua tali-tali feodal yang bersifat pribadi dan menggantikannya dengan operasi-operasi pasar yang tidak bersifat pribadi (Giddens, 1985).

Nilai komunal dalam masyarakat melahirkan toleransi di tingkat norma yang akhirnya menciptakan solidaritas yang kuat satu sama lain. Hal ini terjadi karena kekomunalan mereka membentuk sebuah kekerabatan yang menimbulkan sikap altruisme antara yang satu dengan lainnya sebagai sesama kerabat (William Hamilton, 1960 dalam Fukuyama, 2001). Bentuk nyata dari solidaritas yang kuat ini adalah partisipasi aktif setiap anggota komunitas dalam mengejar kepentingan bersama (Putnam, 1995). Tampaklah bahwa kekerabatan tradisional di Kampung Mondo dapat menjadi sebuah modal sosial yang membentuk komunitas pembangun.

Sumber utama dari kapital sosial di Mondo ternyata adalah Agama. Agama kristiani bercampur dengan kehidupan adat-istiadat yang masih terus diwarisi turun temurun telah menanamkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku bagi seluruh warga Kampung Mondo. Oleh karena mereka hidup bersama secara komunal dan agraris dengan kebunnya di kampung yang sama, hidup dengan diikat oleh nilai-nilai dan norma sosial yang

sama, ada trust yang cukup tinggi di antara mereka satu sama lain. Dengan demikian masyarakat Kampung Mondo dapat menjadi sebuah kapital sosial walau masih bersifat bonding karena keberadaannya yang eksklusif sehubungannya dengan posisinya yang terisolir. Kapital sosial di Kampung Mondo tampak jelas karena warga Mondo dalam kekompakannya dapat menjadi komunitas pembangun yang menggulirkan pembangunan di kampungnya. Pembangunan konkret swadaya warga yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung adalah pembukaan jalan dari kampung mereka yang terisolir ke jalan besar sejauh 4 km dan penyediaan sarana air bersih dengan menyambungkan pipa dari mata air dan membuat bak-bak penampungan air bersih.

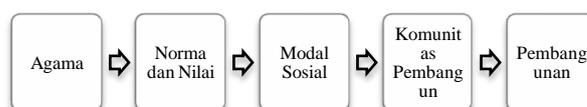


Diagram 1
Modal Sosial dan Komunitas Pembangun yang melahirkan pembangunan

PENUTUP

Semarak kapitalisme dan globalisasi perlu disikapi dengan bijaksana karena belum tentu bisa cocok untuk segala kondisi masyarakat yang di Indonesia. Suatu perubahan sosial yang terjadi secara makro jangan dibiarkan merampas otonomi masyarakat lokal dalam membuat

keputusannya sendiri dan jangan sampai pula mereka terhisap dalam masyarakat yang lebih luas. Masalahnya adalah karena masyarakat kecil ini terhisap untuk menjadi semakin tak berdaya bila terdampar dalam dunia global yang melampaui kekuatan dan kemampuan mereka.

Sasaran utama pembangunan adalah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah yang cocok untuk dapat mencapai tujuan pembangunan tersebut. Dengan adanya pembangunan yang berbasis masyarakat, pembangunan bukan lagi sesuatu yang jauh dari pusat, tetapi lebih "mendarat", bergerak langsung di tengah-tengah orang miskin. Untuk itu, langkah yang bisa ditempuh antara lain adalah pelembagaan pembangunan yang berbasis masyarakat. Langkah ini dapat menjadi suatu pendekatan alternatif dalam sebuah pembangunan. Melalui pembangunan yang berbasis masyarakat ini, pembangunan dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dilakukan langsung di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, harapannya pembangunan dapat menjadi milik rakyat yang dapat dinikmati oleh rakyat (public good). Dengan kapital sosial, masyarakat dapat menjadi aktor pembangunan bagi daerahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, Hans. 2001. *Elite Desa dan Orde Baru*. Dalam buku *Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus dan Perintah Otoriter*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Coleman, James S. (Edited by Partha Dasgupta, Ismail Serageldin). 1988. *Social Capital in The Creation of Human Capital.* The World Bank, Washington D.C., USA
- Fukuyama, Francis. 2001. *Social Capital, Civil Society and Development.* Taylor & Francis, Ltd
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, Jakarta: UI Press.
- Putnam, Robert D. 1995. *Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America.* *Political Science and Politics*, Vol. 28, No.4, American Political Science Association
- Sen, Amartya. 2000. *Development as Freedom*. Anchor Books, New York